

## Tindaklanjut Temuan BPK

# Panja Mulai Kerja

PARMOUT, MERCUSUAR - DPRD Kabupaten (Dekab Parigi Moutong (Parmout) melalui rapat paripurna, Kamis (16/6) akhirnya membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Parmout tahun 2010 yang menunjukkan disclaimer opinion (Tidak memberikan pendapat).

Dalam rapat terjadi perdebatan soal nama tim yang bertugas membahas hal itu, apakah Panja atau Pansus. Namun akhirnya disepakati menggunakan nama Panja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 1 point 10 yang menyebutkan, Panitia Kerja (Panja) adalah alat kelengkapan

DPRD yang diberi tugas untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Mereka yang tergabung dalam anggota Panja adalah Ni Wayan Leli Pariani, I Made Yastina, Husen Mardjengi, Santo, Imam Muslihun, Abdullah Almahdali, Suardi, Salmin G. Lodji, Rahman P. Ondo, Hazairin Paudi, Mayasari Pataray, Mohammad Sain Yoddo, Hasbi Dg. Sitaba, Asmir Ntosa dan Arif Alkatiri.

Hasil rapat internal Panja,

memutuskan Asmir Ntosa sebagai Ketua, I Made Yastina sebagai Wakil Ketua dan Salmin G. Lodji sebagai Sekretaris.

Ketua Panja, Asmir Ntosa pada rapat internal itu menyebutkan, mereka akan mulai bekerja Senin (20/6).

Menurut Asmir Ntosa, pada proses pembahasan LHP tersebut, Panja akan menghadirkan BPK dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Terlebih dahulu mereka akan mengundang BPK RI Perwakilan Sulteng untuk mempresentasikan LHP tersebut.

"Kita undang tim pemeriksanya untuk mempresentasikan, karena mereka yang lebih tahu. Tolong sekretariat dewan untuk segera membuat surat, mengundang mereka Senin depan," ujar Asmir.

Setelah BPK, Panja kata Asmir, akan mengundang SKPD terkait

untuk membahas LHP. Setelah itu, bila ada hal-hal yang perlu diperbaiki secara administrasi, maka SKPD katanya, perlu diberi limit waktu untuk menyelesaikannya. "Bila SKPD tidak mampu menyelesaikan sesuai limit waktu yang diberikan, maka kita dapat merekomendasikan ke ranah yang lebih tinggi lagi," tegas Amir tanpa menjelaskan maksud ranah yang lebih tinggi itu. FAH